

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong relaksasi kebijakan luar negeri Polandia terhadap pengungsi Ukraina pada periode 2022–2024. Menggunakan kerangka teori *Windows of Opportunity* yang dikembangkan oleh Joakim Eidenfalk, penelitian ini mengkaji interaksi antara faktor-faktor domestik dan internasional dalam mendorong perubahan kebijakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa relaksasi kebijakan luar negeri Polandia merupakan hasil dari momentum krisis yang dikombinasikan dengan kesiapan aktor-aktor pengambil keputusan untuk memanfaatkan jendela kesempatan tersebut.

Pertama, dari sisi domestik, birokrasi memainkan peran sentral dalam implementasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap pengungsi Ukraina. Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Polandia (MSWiA) merespons cepat dengan menyusun kerangka hukum yang memungkinkan pengungsi untuk memperoleh nomor identitas PESEL, bekerja secara legal, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Langkah-langkah administratif ini menandai pergeseran penting dari pendekatan Polandia yang sebelumnya cenderung eksklusif terhadap pengungsi dari luar Eropa, seperti Suriah.

Kedua, opini publik Polandia turut berkontribusi dalam menciptakan tekanan sosial dan moral yang mendorong perubahan kebijakan. Masyarakat Polandia secara umum menunjukkan simpati besar terhadap pengungsi Ukraina yang dianggap sebagai “saudara” dalam konteks sejarah dan budaya Eropa Timur.

Perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dan pengungsi non-Eropa mengindikasikan adanya standar ganda yang didasari oleh kesamaan etnis dan nilai-nilai geopolitik. Namun demikian, pada tahun 2023–2024, mulai muncul tanda-tanda kelelahan solidaritas (*solidarity fatigue*) akibat tekanan ekonomi, yang berpotensi menggeser kembali arah kebijakan jika tidak dikelola secara hati-hati.

Ketiga, peran media dan kelompok berkepentingan, khususnya LSM seperti *Polish Migration Forum Foundation* (PMFF), juga memiliki andil besar dalam mengarahkan opini dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih progresif. Media Polandia membingkai pengungsi Ukraina sebagai korban konflik yang sah dan layak dibantu, sementara LSM aktif dalam penyediaan layanan bantuan serta advokasi hak-hak pengungsi. Narasi yang diciptakan oleh media dan LSM memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan krisis.

Keempat, dukungan politik dari partai-partai besar, termasuk Partai Hukum dan Keadilan (PiS), turut mempercepat proses relaksasi kebijakan. Meskipun memiliki riwayat penolakan terhadap pengungsi non-Eropa, PiS memanfaatkan krisis ini untuk memperkuat citra politik mereka sebagai pelindung regional sekaligus memperkuat posisi mereka di panggung Uni Eropa. Partai oposisi seperti Koalisi Sipil dan partai-partai sayap kiri turut mendorong kebijakan yang lebih manusiawi dan terintegrasi dengan kebijakan Uni Eropa.

Dari perspektif internasional, krisis Ukraina membuka ruang diplomasi baru bagi Polandia. Dukungan dari Uni Eropa melalui kebijakan *Temporary Protection Directive* memberikan dasar hukum dan sumber daya keuangan bagi negara-negara anggota, termasuk Polandia, untuk mengadopsi kebijakan terbuka terhadap pengungsi. Dalam kerangka solidaritas Eropa, Polandia diposisikan sebagai negara terdepan dalam merespons krisis kemanusiaan tersebut, sekaligus memperbaiki reputasi politiknya yang sebelumnya dianggap kurang kooperatif dalam isu migrasi.

Hubungan bilateral dengan Ukraina juga mengalami penguatan signifikan. Keputusan Ukraina untuk memberikan hak istimewa kepada warga negara Polandia di wilayahnya menjadi sinyal balasan atas dukungan politik dan kemanusiaan yang diberikan oleh Polandia. Ini menandai bahwa perubahan kebijakan pengungsi bukan hanya dilihat dari aspek domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi bilateral yang memperkuat posisi Polandia di kawasan Eropa Timur.

Selain itu, peran aktor non-negara internasional, terutama UNHCR dan lembaga internasional lainnya, mendorong penyusunan kebijakan berbasis hak asasi manusia dan bantuan teknis serta keuangan. UNHCR tidak hanya menjadi penyedia bantuan langsung, tetapi juga memainkan fungsi advokasi dan pemantauan, sehingga mendorong pemerintah Polandia untuk mempertahankan standar perlindungan yang sesuai dengan hukum internasional.

Relaksasi kebijakan luar negeri Polandia terhadap pengungsi Ukraina juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan *windows of opportunity*. Invasi Rusia menjadi titik krusial yang

membuka peluang perubahan besar dalam orientasi kebijakan luar negeri Polandia. Tekanan domestik dan internasional secara bersamaan menciptakan kondisi yang mendorong para aktor pengambil keputusan untuk bertindak cepat dan adaptif. Dukungan publik yang kuat, kemauan politik yang tinggi, serta kerangka hukum regional dari Uni Eropa menciptakan momentum yang ideal bagi implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa relaksasi ini memiliki karakteristik yang sangat kontekstual. Artinya, perubahan kebijakan lebih didasarkan pada identitas pengungsi dan konteks geopolitik, daripada pada prinsip universalitas perlindungan. Hal ini terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dibandingkan pengungsi non-Eropa, yang menimbulkan tantangan dalam hal konsistensi kebijakan dan komitmen terhadap nilai-nilai HAM dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Polandia terhadap pengungsi Ukraina mencerminkan kombinasi antara respons moral, tekanan politik, dan strategi geopolitik. Polandia berhasil memanfaatkan momen krisis untuk memperkuat posisi domestik dan internasionalnya melalui kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan kolaboratif. Namun keberlanjutan dari kebijakan ini sangat tergantung pada perkembangan situasi politik, ekonomi, dan sosial, baik di tingkat nasional maupun regional.